



---

## Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2012 -2016

Muhammad Rusdi · Barika · Izharudin · Lela Rospida

**Abstract.** This study aims to find out how the level of regional inequality between provinces on the island of Sumatra and how the population, investment, government spending and inflation influence regional inequality in Sumatra. We also analyze the pattern of economic growth in Sumatra according to the class typology. We also estimate Regional Inequality (Region) by Williamson index and use multiple regression to analysis the determinant inequality. The results study shows that 60 percent of the provinces in Sumatra fall into the category of low inequality, these provinces are North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, Bengkulu, Lampung and the Bangka Belitung Islands. The province of Aceh is included in the category of moderate inequality. The other 3 provinces, namely Riau, Jambi and Riau Islands have High inequality indices. Overall, population growth, Investment, Capital Expenditures and Inflation variables together / overall have a significant influence on regional economic inequality variables. Partially variable population growth and capital expenditure have a significant positive effect, while the investment variable has a significant negative effect on the economic inequality of the Sumatra region. The variable inflation is not significant to the economic inequality of the Sumatra region. Based on the results of Klassen's typology analysis, it can be seen that the provinces of North Sumatra, West Sumatra, Jambi, South Sumatra, Bengkulu and Lampung are fast growing provinces (high growth but low income). Provinces that are included in the fast growth and high income class are the provinces of Aceh and Bangka Belitung and the category of relatively low and low income cities is the Riau Islands province.

**Keywords :** *Inequality, Williamson Index, Klassen's Typology*

---

©2018 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

### 1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi telah menjadi prioritas dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

---

Muhammad Rusdi (✉)  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu  
Email : [rusdi.muhammad62@gmail.com](mailto:rusdi.muhammad62@gmail.com)

Barika  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

Izharudin  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

Lela Rospida  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

secara lebih merata ke seluruh daerah dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan, serta ketimpangan ekonomi dan wilayah (Sirojuzilam, 2008).

Dengan diberlakukannya undang-undang RI no 32 dan 33 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka peranan pemerintah daerah sangat dominan dalam menentukan kebijakan daerahnya sendiri yang memungkinkan terjadinya ketimpangan ekonomi.

Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi dimana pembangunan ekonomi masing-masing provinsi tidak sama. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki tiap wilayah yang berbeda-beda. Table 1 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB perkapita di Sumatera.

Table 1. Laju pertumbuhan PDRB perkapita provinsi di Sumatera tahun 2011 – 2016.

No	Provinsi	Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga konstan 2010 (persen)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	1.13	1.74	0.56	-0.43	-2.62	1.4
2	Sumatera utara	5.11	4.96	4.65	3.88	3.81	3.94
3	Sumatera barat	4.88	4.88	4.69	4.53	4.21	4
4	Riau	2.78	1.06	-0.14	0.13	-2.24	-0.23
5	Jambi	5.82	5.06	4.92	5.49	2.44	2.65
6	Sumatera selatan	4.73	5.23	3.78	3.3	2.98	3.63
7	Bengkulu	4.97	4.98	4.28	3.74	3.44	3.65
8	Lampung	5.16	5.09	4.48	3.85	3.95	4.02
9	Kep. Bangka Belitung	4.52	3.18	2.92	2.43	1.89	1.96
10	Kep. Riau	3.53	4.27	3.97	3.49	3.02	2.18

Sumber : BPS Indonesia

Table 1, memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2011 hingga 2016. Secara rata-rata PDRB perkapita provinsi-provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan yang positif. Akan tetapi ada dua wilayah yang mengalami pertumbuhan negative yakni Aceh dan Riau.

Tujuan daripada Pembangunan antara lain adalah untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan hasil pembangunan belum dinikmati oleh penduduk secara merata. Adanya ketimpangan pembangunan antar provinsi di Sumatera disebabkan berbagai kendala, baik dari segi investasi, maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing provinsi yang tidak sama (Yeniwati, 2013).

Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan diuraikan oleh Manik, 2009 yang menyatakan ada 5 faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan Kondisi Demografi, Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa, Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah, dan Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Berapa besar tingkat ketimpangan regional antar provinsi di pulau Sumatera berdasarkan indeks Williamson?



2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, investasi dan belanja modal, upah minimum provinsi terhadap ketimpangan regional di Sumatera?
3. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi dan klasifikasi pertumbuhan di Sumatera menurut tipologi klassen?

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. *Ketimpangan regional*

Ketimpangan pembangunan ekonomi regional merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Ada beberapa penyebab Ketimpangan antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan atas potensi wilayah menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda-beda. Perbedaan pembangunan antar wilayah menjadikan adanya pembagian atas wilayah-wilayah yang terdiri dari wilayah maju dan wilayah terbelakang Sjafrizal (2008).

Perbedaan potensi dan kandungan sumber daya alam, Perbedaan Kondisi Demografi, Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa, Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah, dan Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah merupakan faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009). Sementara itu Tambunan (2001) mengidentifikasi beberapa factor ketimpangan wilayah antara lain, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi Investasi, tingkat mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan Sumberdaya Alam antar daerah, perbedaan kondisi demografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan.

Untuk dapat mengetahui daerah yang cepat tumbuh dan daerah yang tertinggal dapat digunakan matrik Tipologi Klassen dengan menggunakan dua indikator yaitu laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita. Empat klasifikasi daerah menurut Klassen:

- a. Jika laju pertumbuhan PDRB suatu daerah  $>$  pertumbuhan PDRB rata-rata, serta pendapatan perkapita daerah tersebut  $>$  pendapatan per kapita rata-rata, maka daerah tersebut termasuk dalam kelompok **daerah maju dan tumbuh cepat** (*Rapid Growth Region*)
- b. Jika laju pertumbuhan PDRB suatu daerah  $>$  pertumbuhan PDRB rata-rata, tetapi pendapatan perkapita daerah tersebut  $<$  pendapatan per kapita rata-rata, maka daerah tersebut termasuk dalam kelompok **daerah berkembang cepat** (*Growth Region*)
- c. Jika laju pertumbuhan PDRB suatu daerah  $<$  pertumbuhan PDRB rata-rata, tetapi pendapatan perkapita daerah tersebut  $>$  pendapatan per kapita rata-rata, maka daerah tersebut termasuk dalam kelompok **daerah maju tetapi tertekan** (*Retarded Region*)
- d. Jika laju pertumbuhan PDRB suatu daerah  $<$  pertumbuhan PDRB rata-rata, tetapi pendapatan perkapita daerah tersebut  $<$  pendapatan per kapita rata-rata, maka daerah tersebut termasuk dalam kelompok **daerah kurang berkembang**. (*Relatively Backward Region*)



## 2.2. *Pertumbuhan Ekonomi*

Beberapa definisi dari pertumbuhan ekonomi telah banyak dikemukakan, salah satunya adalah Todaro (2006) yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus dan atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga dapat dihasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin besar.

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu yang dikemukakan Todaro (2006), yakni

1. Akumulasi modal, merupakan semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal ataupun sumber daya manusia (SDM).
2. Pertumbuhan penduduk yang dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi

## 2.3. *Ukuran Ketimpangan antar wilayah*

Untuk mengukur adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah, perlu dibedakan terlebih dahulu antara mengukur ketimpangan dalam pembagian atau distribusi pendapatan dengan mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah. Secara umum untuk mengetahui besarnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan digunakan alat ukur seperti Gini Ratio, Kurva Lorenz dan alat ukur berdasarkan kriteria Bank Dunia. Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah digunakan alat ukur seperti Williamson Index dan Theil Index.

Indeks Williamson adalah merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah. Indeks Williamson pada awalnya dipergunakan dan dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson dihitung berdasarkan pada data PDRB masing-masing daerah. dengan menggunakan rumus Indeks Williamson diperoleh hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau  $0 < VW < 1$ . Kriteria angka indeks Williamson yakni jika semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Safrizal, 1997, dalam Barika, 2012). Semakin besar IW maka semakin besar kesenjangan, sebaliknya jika IW semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Nilai  $IW < 0,3$  berarti disparitas pendapatan yang terjadi tergolong rendah, IW antara 0,3 – 0,4 termasuk kategori sedang, kemudian dikatakan tinggi jika  $IW > 0,4$ . (Emilia. 2006)

## 2.4. *Penelitian Terkait*

Penelitian terkait ketimpangan regional telah banyak dilakukan, diantaranya Wei Dennis, 1999 yang melakukan penelitian *Regional inequality in China*. Hartono, 2008 menyatakan bahwa bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa tengah yang diukur dengan Indeks Williamson dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2005 cenderung relatif meningkat.

Penelitian Yuliani, 2015, menyatakan bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2012 ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Kalimantan Timur sebesar 0.69 di tahun 2010 menjadi 0.72 di tahun 2012. Sedangkan dari hitungan Entropi Theil diketahui bahwa rata-rata terdapat ketimpangan pendapatan sebesar 17.45. hukum Kuznets berlaku di Kalimantan Timur selama tahun 2010 sampai dengan 2012.



Hasil penelitian Yeniwati 2013, menunjukkan bahwa, dari 10 propinsi yang ada di Sumatera yang memiliki indeks ketimpangan yang lebih besar dari rata-rata Sumatera ada 5 propinsi. Sementara itu, hasil estimasi terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dengan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera. Variabel aglomerasi dan sumber daya alam berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera.

Khairunissa menemukan hasil analisis *Indeks Williamson* menunjukkan bahwa terdapat tujuh kecamatan dengan nilai IW yang menurun dan 14 kecamatan dengan nilai IW yang meningkat. Untuk nilai IW antar kecamatan, nilai IW tergolong rendah dengan rata-rata indeks sebesar 0.16994. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan nilai IW yang relatif naik.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### 3.2. Jenis dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan, 2004:37). Data yang akan dikumpulkan meliputi data PDRB perkapita, jumlah penduduk, investasi dan UMP. Sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses melalui internet dengan situs antara lain; [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Jenis data adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antar daerah) dan data *time series* (runtun waktu).

#### 3.3. Metode analisis

##### 3.3.1. Analisis Ketimpangan Regional (Wilayah)

Indeks dari Jeffery G. Williamson atau indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997: 31):

$$I_w = \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}) (f; n)}{y}$$

dimana :

IW = Indeks Ketimpangan Williamson

Y<sub>i</sub> = PDRB per kapita di Kabupaten/kota di provinsi Bengkulu

Y = PDRB per kapita rata-rata Provinsi Bengkulu

f<sub>i</sub> = jumlah penduduk di Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

n = jumlah penduduk Provinsi Bengkulu

I<sub>w</sub> = 0 artinya merata sempurna

I<sub>w</sub> = 1 artinya ketimpangan sempurna



### 3.3.2. Analisis regresi data panel.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan tehnik analisis kuantitatif. Data dianalisis dengan regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis panel data (*pooled data*). pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program *evIEWS 9.0*.

Untuk menentukan permodelan regresi data panel menggunakan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* dapat ditentukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman (Widarjono, 2007).

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

Pada tahun 2016 provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah provinsi Sumatera Utara sebanyak 14.102.911 jiwa atau sebesar 25,13 persen dari penduduk pulau Sumatera. Adapun provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.401.827 atau 2,50 persen.

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.205.141 jiwa dan luas wilayah 33.843Km<sup>2</sup>, Lampung memiliki kepadatan penduduk sebesar 242 jiwa/Km<sup>2</sup>. Provinsi Sumatera Utara memiliki kepadatan penduduk tinggi kedua setelah provinsi Lampung yakni 195 jiwa/Km<sup>2</sup>. Provinsi Riau meskipun memiliki wilayah yang terbesar kedua setelah provinsi Sumatera Selatan, memiliki kepadatan penduduk yang relative sedikit yakni sebesar 72 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 89.899Km<sup>2</sup>. adapun provinsi Jambi memiliki kepadatan penduduk paling rendah yakni 70 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Salah satu indicator untuk melihat keadaan ekonomi suatu wilayah adalah Pendapatan Perkapita. Pendapatan perkapita mencerminkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah. Provinsi kepulauan Riau adalah provinsi dengan PDRB perkapita tertinggi yakni Rp.80.330.450,- pada tahun 2016. Provinsi Riau adalah provinsi kedua dengan PDRB perkapita tinggi yakni sebesar Rp.70.604.430,-. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang memiliki PDRB perkapita terendah yakni Rp.21.041.590,-

Dari sisi ketenagakerjaan, pada tahun 2016 terdapat beberapa daerah yang mengalami pergeseran dalam hal jumlah pengangguran terbuka. Provinsi kepulauan Riau berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbukanya dimana pada kondisi Februari 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,03 persen turun menjadi 7,69 persen pada kondisi agustus 2016. Demikian halnya dengan provinsi Aceh mampu menurunkan tingkat pengangguran dari 8,13 persen di bulan Februari menjadi 7,57 persen di bulan Agustus. Namun demikian, Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi yang mampu menekan tingkat pengangguran terbesar dari 6,17 persen di bulan Februari 2016 menjadi 2,60 persen di kondisi Agustus 2016. Terdapat dua wilayah atau provinsi yang mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka yakni provinsi Sumatera selatan dan Provinsi Riau. Pada kondisi Februari 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,94 persen meningkat menjadi 4,31 persen pada kondisi Agustus 2016.

Adapun kondisi yang sama terjadi pada provinsi Riau, dimana pada kondisi Februari 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,94 persen meningkat menjadi 7,43 persen pada kondisi Agustus 2016. Di tahun 2016 provinsi yang memiliki



pengangguran terbuka terendah adalah provinsi Bengkulu dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3.84 persen dan 3, 30 persen pada kondisi bulan februari dan Agustus 2016.

#### 4.2. Deskripsi Data

##### a. Indeks Williamson

Dalam penelitian ini untuk data ketimpangan digunakan indeks williamson provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2012 – 2016.

Tabel 2. Indeks Williamson di Sumatera tahun 2012 -2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	0.430	0.417	0.394	0.375	0.382
Sumatera Utara	0.381	0.377	0.381	0.385	0.392
Sumatera Barat	0.261	0.262	0.262	0.265	0.268
Riau	0.538	0.493	0.448	0.431	0.403
Jambi	0.533	0.528	0.519	0.508	0.535
Sumatera Selatan	0.322	0.275	0.325	0.329	0.320
Bengkulu	0.380	0.369	0.368	0.370	0.370
Lampung	0.226	0.230	0.229	0.232	0.242
Kepulauan Bangka Belitung	0.186	0.187	0.189	0.193	0.196
Kepulauan Riau	0.594	0.590	0.574	0.557	0.581

Sumber : Pengolahan data sekunder, 2018.

Pada tahun 2012 rata-rata nilai indeks williamson Sumatera adalah 0,385. Provinsi dengan nilai indeks williamsom tertinggi adalah provinsi kepulauan Riau yakni sebesar 0,594. Hingga tahun 2016 nilai indeks williamson provinsi Kepulauan Riau tetap paling tinggi di Sumatera. Hal ini berarti bahwa provinsi Kepulauan Riau memiliki ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan yang tinggi. Adapun provinsi dengan nilai indeks williamson terendah adalah kepulauan Bangka Belitung, sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 indeks williamson di Kepulauan Bangka Belitung kurang dari 0,2. Indeks ini jauh dari rata-rata indeks williamson Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kepulauan bangka Belitung tingkat ketimpanga ekonomi/pendapatannya rendah. Pada tahun 2017, provinsi yang meiliki indeks williamson di bawah indeks williamson rata-rata Sumatera (0,369) adalah provinsi Sumatera Barat, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung.

##### b. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laju penduduk tahun 2012 hingga 2016 yang dinyatakan dalam persentase.



Tabel 3. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera tahun 2012 -2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	2.081	2.036	1.989	1.940	1.884
Sumatera Utara	1.417	1.358	1.299	1.241	1.185
Sumatera Barat	1.360	1.326	1.291	1.255	1.217
Riau	2.670	2.623	2.571	2.521	2.468
Jambi	1.878	1.828	1.774	1.725	1.670
Sumatera Selatan	1.524	1.483	1.441	1.395	1.349
Bengkulu	1.751	1.721	1.675	1.632	1.594
Lampung	1.285	1.235	1.186	1.135	1.082
Kepulauan Bangka Belitung	2.257	2.215	2.190	2.150	2.114
Kepulauan Riau	3.219	3.119	3.008	2.900	2.796

Sumber : Pengolahan data sekunder, 2018.

Provinsi yang mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun 2012 adalah provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,219 persen dan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan penduduk hingga tahun 2016. Selanjutnya provinsi Riau dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,670 persen pada tahun 2012 menjadi 2,468 persen pada tahun 2016. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah adalah provinsi Lampung yakni 1,285 persen di tahun 2012 menjadi 1,082 persen di tahun 2016.

c. Belanja Modal/Pengeluaran Daerah

Data variabel belanja daerah merupakan data rasio belanja modal terhadap total belanja daerah di provinsi-provinsi pulau Sumatera tahun 2012 hingga tahun 2016.

Tabel 4. Rasio Belanja Modal terhadap Total belanja Daerah di Sumatera tahun 2012 – 2016.

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	12.662	16.388	22.738	22.778	23.401
Sumatera Utara	20.417	22.128	21.340	20.154	19.648
Sumatera Barat	18.538	20.073	19.955	19.807	21.668
Riau	28.377	30.256	25.851	26.549	21.141
Jambi	28.079	31.124	28.843	24.269	24.202
Sumatera Selatan	28.149	30.256	29.374	25.757	22.774
Bengkulu	19.499	20.826	21.586	23.368	23.705
Lampung	21.754	22.111	20.987	20.595	22.432
Kepulauan Bangka Belitung	26.852	26.390	22.965	22.963	22.684
Kepulauan Riau	17.593	20.988	22.372	17.617	18.658

Sumber : Pengolahan data 2018



Belanja modal diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga dapat memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.

d. Investasi

Nilai investasi dalam penelitian ini mencakup lingkup Rasio Penanaman Modal Tetap Bruto terhadap PDRB provinsi berdasarkan jenis pengeluaran tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 5. Rasio Penanaman Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Sumatera Tahun 2012 – 2016.

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1. Aceh	32.045	31.082	32.224	33.634	34.810
2. Sumatera Utara	30.459	30.205	29.589	29.244	29.141
3. Sumatera Barat	30.559	30.139	29.911	29.571	29.037
4. Riau	28.424	29.194	28.938	30.034	30.437
5. Jambi	24.782	25.291	23.433	22.261	22.474
6. Sumatera Selatan	38.656	38.445	38.391	36.859	37.970
7. Bengkulu	42.254	43.173	44.229	43.537	43.914
8. Lampung	31.415	30.833	31.002	31.090	32.115
9. Kepulauan Bangka Belitung	21.319	21.261	21.305	21.373	21.809
10. Kepulauan Riau	40.668	40.444	40.138	39.094	38.129

Sumber : Pengolahan data 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui secara rata-rata di Sumatera sumabngan Nilai Investasi ( Penanaman Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB sebesar 31 persen. Tahun 2012 provinsi yang paling rendah nilai Rasio Investasinya adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 21,319 dan paling tinggi adalah provinsi Bengkulu sebesar 42,254 persen. Selama li atahun terakhir rasio penanaman modal tetap bruto di provinsi Bengkulu tetap tertinggi.

e. Inflasi

Pada penelitian ini variabel inflasi merupakan inflasi perkotaan di Sumatera pada tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 6. Inflasi di Sumatera tahun 2012-2016.

Provinsi/ Province	2012	2013	2014	2015	2016
1. Aceh	0.22	7.31	8.09	1.53	3.96
2. Sumatera Utara	3.86	10.18	8.17	3.24	6.33
3. Sumatera Barat	4.16	10.87	11.56	1.10	4.88
4. Riau	3.32	8.79	8.66	2.64	4.03
5. Jambi	4.22	8.74	8.75	1.36	4.39
6. Sumatera Selatan	2.72	7.04	8.48	3.09	3.58



7. Bengkulu	4.61	9.94	10.85	3.25	5.00
8. Lampung	4.3	7.56	8.09	4.37	2.77
9. Kepulauan Bangka Belitung	6.57	8.71	9.05	3.33	6.77
10. Kepulauan Riau	2.37	8.23	7.59	4.41	3.53

Sumber : BPS beberapa tahun penerbitan, data diolah.

Inflasi yang terjadi di Sumatera selama periode tahun 2012 hingga tahun 2016 termasuk ke dalam kategori Inflasi Ringan yakni di bawah 10 persen. Di provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 terjadi inflasi tertinggi dengan nilai sebesar 6,57 persen. Tahun 2013 inflasi yang terjadi berkisar 7,04 persen hingga 10, 87 persen dimana tingkat inflasi tertinggi di provinsi Sumatera Barat dan terendah di provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2015, kisaran tingkat inflasi di Sumatera antara 1,10 persen hingga 4,41 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2015 perubahan harga-harga terbilang rendah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi tahun 2016 dengan nilai tertinggi yakni 6,77 persen dan provinsi Lampung memiliki nilai inflasi terendah yakni 2,77 persen.

### 4.3. Analisis data dan Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1. Analisis ketimpangan wilayah.

Untuk melihat ketimpangan wilayah maka dilakukan perhitungan dengan rumus indeks Williamson.

Tabel 7. Analisis Indeks williamson

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	rata-rata	Kriteria Ketimpangan
Aceh	0.430	0.417	0.394	0.375	0.382	0.400	Sedang
Sumatera Utara	0.381	0.377	0.381	0.385	0.392	0.383	Rendah
Sumatera Barat	0.261	0.262	0.262	0.265	0.268	0.264	Rendah
Riau	0.538	0.493	0.448	0.431	0.403	0.463	Tinggi
Jambi	0.533	0.528	0.519	0.508	0.535	0.525	Tinggi
Sumatera Selatan	0.322	0.275	0.325	0.329	0.320	0.314	Rendah
Bengkulu	0.380	0.369	0.368	0.370	0.370	0.371	Rendah
Lampung	0.226	0.230	0.229	0.232	0.242	0.232	Rendah
Kepulauan Bangka Belitung	0.186	0.187	0.189	0.193	0.196	0.190	Rendah
Kepulauan Riau	0.594	0.590	0.574	0.557	0.581	0.579	Tinggi
Rata-rata Sumatera	0.385	0.373	0.369	0.365	0.369		

Sumber : Pengolahan data 2018.



#### 4.3.2. Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh jumlah penduduk, investasi, belanja modal dan inflasi terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera digunakan analisis regresi data panel. Model regresi yang dipakai adalah Fixed Effect Model. Model ini dipilih karena menunjukkan nilai perbandingan konstanta ketimpangan di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera. Adapun model regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,3712 + 0,2276X_1 - 0,0148X_2 + 0,0023X_3 + 0,0002X_4 + e$$

Dimana : Y adalah Ketimpangan Wilayah

X1 adalah Pertumbuhan Penduduk

X2 adalah Rasio Investasi terhadap PDRB

X3 adalah Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah

X4 adalah Inflasi

#### 4.3.3. Pengujian Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Nilai koefisien Determinasi adalah 0,98 berarti bahwa kemampuan pertumbuhan penduduk, Rasio investasi terhadap PDRB, Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah dan Inflasi dalam menjelaskan ketimpangan wilayah di Sumatera adalah sebesar 98 persen sedangkan sisanya 0,02 dijelaskan oleh variable lain.

##### b. Hasil Perhitungan Uji F (F-test)

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent. Dilihat dari nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 berarti secara keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, artinya variabel pertumbuhan penduduk, Investasi, Belanja Modal dan Inflasi secara bersama-sama /keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan wilayah di Sumatera. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang signifikan.

##### c. Hasil Perhitungan Uji t ( t – test)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung variabel pertumbuhan penduduk ( $X_1$ ) sebesar 2,283 dengan probabilitas sebesar 0,02 . Artinya probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% atau  $\alpha = 0,05$  sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Nilai t hitung untuk variable Investasi ( $X_2$ ) sebesar -3.881 dengan probabilitas sebesar 0,000. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% atau  $\alpha = 0,05$ , sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Investasi berpengaruh negative secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Adapun variable Belanja Modal ( $X_3$ ) memiliki nilai t hitung sebesar 1,841 dengan



probabilitas sebesar 0,07. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih besar dari pada tingkat signifikansi 5% atau  $\alpha = 0,05$ . Variable belanja modal signifikan pada alpha 10 % atau  $\alpha = 0,10$ , sehingga kita dapat menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Nilai t hitung untuk variable Inflasi ( $X_4$ ) sebesar 0,090 dengan probabilitas sebesar 0,92. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% atau  $\alpha = 0,05$  maupun signifikansi 10%, sehingga kita dapat menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menyimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

#### 4.3.4. Analisis tipology Klassen

Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi di Sumatera digunakan analisis tipologi kelas, pola pertumbuhan diklasifikasikan menjadi empat kelompok/golongan, yaitu : provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) berada pada kuadran satu, provinsi yang berkembang cepat (*high growth but low income*) berada pada kuadran dua, provinsi relatif tertinggal (*low growth and low income*) berada pada kuadran tiga, provinsi yang maju tapi tertekan (*high income but low growth*) berada pada kuadran empat.

Tabel 5.11. hasil perhitungan Tipology Klassen Sumatera tahun 2012 – 2016.

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	I	I	I	I	I
Sumatera Utara	II	II	II	II	II
Sumatera Barat	II	II	II	II	II
Riau	IV	IV	IV	IV	IV
Jambi	II	II	II	II	II
Sumatera Selatan	II	I	I	II	II
Bengkulu	II	II	II	II	II
Lampung	II	II	II	II	II
Kep Bangka Belitung	I	I	I	I	I
Kepulauan Riau	III	III	III	III	III

Sumber : BPS data diolah 2018.

#### 4.4. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa 60 persen provinsi-provinsi di Sumatera termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, dimana nilai Indeks Williamson di bawah 0,30. Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Adapun provinsi Aceh termasuk kedalam katagori ketimpangan sedang ( nilai Indeks Williamson berkisar antara 0,30 hingga 0,40). Adapun 3 provinsi lainnya yakni provinsi Riau, Jambi dan Kepulauan Riau memiliki indeks ketimpangan Tinggi yakni lebih dari 0,40. Pada tabel 5.10 dapat diketahui bahwa provinsi yang memiliki nilai ketimpangan paling tinggi pada tahun 2016 adalah provinsi Kepulauan Riau dengan Indeks williamson



sebesar 0,581. Jambi juga merupakan wilayah yang memiliki nilai indeks Williamson tinggi yakni sebesar 0,535. Secara rata-rata dari tahun 2012 hingga tahun 2016, ketimpangan di provinsi Kepulauan Riau tetap paling tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain di Sumatera. Beberapa wilayah yang memiliki indeks ketimpangan di atas rata-rata ketimpangan Sumatera antara lain adalah provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi dan kepulauan Riau. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya memiliki nilai ketimpangan di bawah rata-rata.

Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan (uji F) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk, Investasi, Belanja Modal dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Bengkulu. Variable pertumbuhan penduduk, Belanja Modal dan Inflasi mempunyai hubungan yang positif terhadap ketimpangan wilayah yang artinya jika pertumbuhan penduduk, Belanja Modal dan Inflasi meningkat maka ketimpangan akan meningkat pula. Akan tetapi variable Investasi mempunyai hubungan yang negative yang artinya jika terjadi peningkatan investasi maka ketimpangan wilayah akan berkurang.

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,3712 + 0,2276X_1 - 0,0148X_2 + 0,0023X_3 + 0,0002X_4 + e$$

Nilai intersep atau konstanta sebesar 0,3712 dengan probabilitas sebesar 0,042 yang berarti nilai probabilitas < alpha (0,042 < 0,05). Hal ini berarti bahwa tanpa rata-rata ketimpangan wilayah yang terjadi di Sumatera adalah sebesar 0,3712.

Adapun intersep atau konstanta masing-masing provinsi di Sumatera memiliki nilai yang berbeda. Konstanta ketimpangan wilayah di provinsi Aceh lebih tinggi 0,0149 dibandingkan rata-rata ketimpangan wilayah Sumatera. Demikian halnya dengan beberapa provinsi yang memiliki konstanta di atas rata-rata Sumatera lainnya adalah provinsi Sumatera Utara (0,1066), Jambi (0,0345), Sumatera Selatan (0,1147), Bengkulu (0,2099), Lampung (0,0028) dan Kepulauan Riau (0,0648).

Provinsi-provinsi yang memiliki konstanta ketimpangan yang lebih rendah daripada rata-rata ketimpangan wilayah Sumatera adalah provinsi Sumatera barat dengan intersep dibawah rata-rata sebesar 0,0047, provinsi Riau lebih rendah 0,1212 dan Bangka Belitung 0,4198 lebih rendah dibandingkan rata-rata konstanta ketimpangan wilayah Sumatera.

Hasil estimasi antara pertumbuhan penduduk dengan ketimpangan wilayah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Dengan nilai koefisien pertumbuhan penduduk sebesar 0,228 berarti bahwa jika terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen maka ketimpangan wilayah akan bertambah sebesar 0,228 persen dengan asumsi variable Investasi, Belanja Modal dan Inflasi dianggap tetap. Arsyad,1997 menyatakan salah satu penyebab ketimpangan di Negara Sedang Berkembang adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan pendapatan perkapita menjadi rendah jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Pendapatan perkapita merupakan salah satu komponen dalam perhitungan ketimpangan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dengan indeks ketimpangan ekonomi/pendapatan yang tinggi juga.

Adapun koefisien variable Investasi bernilai negative dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Nilai koefisien variable Investasi adalah sebesar -0,015 artinya jika Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB meningkat sebesar 1



persen maka akan mengurangi ketimpangan wilayah sebesar 0,015 persen dengan asumsi variable pertumbuhan penduduk, Belanja Modal dan Inflasi dianggap tetap. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Islami (2018) yang meneliti factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh negative secara signifikan.

Dalam pembangunan ekonomi, investasi merupakan hal yang bersifat kumulatif, dimana bagi daerah-daerah yang bernasib baik, investasi akan mendorong kepada hal-hal yang positif, tetapi sebaliknya di daerah yang kurang beruntung, investasi justru menuju arah yang negative. Daerah yang sedang mengalami perkembangan akan mengalami kenaikan permintaan dan selanjutnya mendorong terjadinya investasi, sementara daerah yang mengalami perlambatan ekonomi, akan menekan permintaan terhadap modal (Adhisasmita dalam Islami, 2018). Hasil penelitian Andhiani 2018 juga menunjukkan hasil yang sama dimana variable Investasi berpengaruh negative secara signifikan.

Variable Belanja Modal sebagai proxy dari pengeluaran pemerintah diukur melalui rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. koefisien belanja modal bernilai 0,002 dan signifikan pada alpha 10%. Artinya dengan jika belanja modal sama dengan Nol maka ketimpangan wilayah di Sumatera akan naik sebesar 0,002 persen dengan asumsi variable pertumbuhan penduduk, Investasi dan Inflasi dianggap tetap

Selanjutnya adalah variable Inflasi yang mempunyai hubungan positif akan tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini bertentangan dengan pendapat Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris tahun (1973) dalam Arsyad,(1997) yang menyatakan bahwa Inflasi merupakan salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan di Negara sedang berkembang, hal ini dikarenakan penerimaan pendapatan yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang dan jasa.

Hasil klasifikasi Klassen menunjukkan bahwa sebanyak 60 persen provinsi di wilayah Sumatera berada pada klasifikasi provinsi yang berkembang cepat (*high growth but low income*). Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Ke enam provinsi ini memiliki pendapatan perkapita di atas pendapatan perkapita rata-rata Sumatera namun laju PDRB berada di bawah rata-rata Sumatera. Provinsi yang masuk dalam kelas cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) berada pada kuadran satu adalah provinsi Aceh dan Bangka Belitung yang memiliki nilai pendapatan perkapita di atas rata-rata dan laju pertumbuhan PDRB di atas rata-rata. Daerah yang masuk ke dalam kategori kota relatif tertinggal (*low growth and low income*) berada pada kuadran tiga adalah provinsi Kepulauan Riau.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Sumatera pada tahun 2016 yang termasuk dalam ketimpangan tinggi terjadi pada provinsi Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.
2. Secara keseluruhan variabel pertumbuhan penduduk, Investasi, Belanja Modal dan Inflasi secara bersama-sama /keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan ekonomi wilayah Sumatera.



3. Secara parsial variable pertumbuhan penduduk dan Belanja modal berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan variable Investasi berpengaruh negative secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah Sumatera. Adapun variable Inflasi tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi wilayah Sumatera.
4. Provinsi yang berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Provinsi yang masuk dalam kelas cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah provinsi Aceh dan Bangka Belitung dan kategori kota relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah provinsi Kepulauan Riau.

## 5.2. *Saran*

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah diharapkan mampu memberikan kemudahan perizinan usaha yang mampu meningkatkan iklim investasi yang lebih baik.
2. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan rasio belanja modal yang lebih mengutamakan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
3. Bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan variable-variabel lain selain variable ekonomi untuk dapat menjelaskan penyebab ketimpangan yang terjadi antar provinsi di Sumatera.

## Daftar Pustaka

- Andhiani.Kartira Dorcas. 2018. Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No.1, Januari – April 2018.
- Barika, 2012. Analisis ketimpangan pembangunan wilayah kabupaten/kota Di provinsi Bengkulu tahun 2005 – 2009. Jurnal Ekonomi dan perencanaan pembangunan (JEPP) Volume 04 No.03, januari – Juni 2012.
- Emilia. 2006. Modul Ekonomi Regional. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Hartono, Budiantoro, 2008, Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, Tesis S.2 Program Pasca Sarjana. Undip. Semarang.
- Islami Fitrah Sari. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 33 No. 1 Januari 2018.
- Khairunisa Astari. Analisis Disparitas pembangunan ekonomi antar Kecamatan di kota medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 NO.7*. diunduh tanggal 26 April 2018. <https://media.neliti.com/.../14845-ID- analisis-disparitas-pembangunan-ekonomi-antar->
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.



- Liana dan Vaulina. 2015. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di provinsi Riau. *Jurnal Dinamika Pertanian Volume XXX Nomor 3 Desember 2015* (261–272).
- Masli, Lili. 2007. Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sirojuzilam, 2008. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara. Pustaka Bangsa Press.
- Sjafrizal, 2012, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jakarta , Jurnal Buletin Prisma.
- Sukirno, 2006. Makroekonomi: Teori Pengantar , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Syafrizal, 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Baduose Media.
- Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. 15 Oktober 2004. *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.15 Oktober 2004. *Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Yeniwati. 2013. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Volume II. Padang : FE Universitas Negeri Padang.
- Yuliani Tutik, 2015, Pertumbuhan ekonomi Dan ketimpangan pendapatan Antar kabupaten di Kalimantan Timur. *Jejak* 8 (1) (2015): 1-88. DOI: 10.15294/jejak.v7i1. JEJAK. Journal of Economics and Policy. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak>.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia FE UII.
- Wei Dennis Yehua. 1999. Regional inequality in China. *Jurnal Progress in Human Geography* 23,1 (1999) pp. 49–59. Wei, Y D. *Progress in Human Geography*; London Vol. 23, Iss. 1, (Mar 1999): 49-59. <https://search.proquest.com/docview/230703009/C649F974BDC64F83PQ/2?accountid=38628> diunduh tanggal 26 april 2018.

